

## Implikasi kebijakan bahasa nasional pada pembelajaran menulis surat resmi: Studi kasus penurunan kemampuan bahasa digital siswa SMP

Wahyuni<sup>1</sup>, Jaja<sup>2\*</sup>, Jimat Susilo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Pendidikan Bahasa Indonesia/Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Email: [jajawilsa@gmail.com](mailto:jajawilsa@gmail.com)

\* Penulis korespondensi

### Informasi artikel

Dikirim : 18 Juli 2025  
Revisi : 20 Maret 2026  
Diterima : 28 Maret 2026

### Kata kunci:

Kebijakan Bahasa Nasional  
Surat Resmi  
Pembelajaran Menulis  
Literasi Digital

### Keywords:

National Language Policy  
Formal Letter  
Writing Instruction  
Digital Literacy

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi kebijakan bahasa nasional terhadap kemampuan menulis surat resmi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam konteks komunikasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada salah satu SMP negeri di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bahasa nasional belum berjalan optimal dalam membentuk kompetensi penggunaan ragam bahasa resmi di lingkungan digital. Dominasi praktik komunikasi informal berbasis digital berkontribusi pada rendahnya kemampuan siswa dalam menyusun surat resmi sesuai kaidah kebahasaan. Temuan ini mengungkap adanya kesenjangan antara arah kebijakan bahasa dan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya reorientasi pembelajaran bahasa yang adaptif terhadap konteks digital tanpa mengabaikan standar kebahasaan formal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kebijakan bahasa nasional melalui integrasi pendekatan kontekstual dan multimodal dalam kurikulum serta praktik pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan literasi formal siswa secara berkelanjutan.

### ABSTRACT

**Implications of National Language Policy on Learning to Write Formal Letters: A Case Study of the Decline in Junior High School Students' Digital Language Skills.** This study aims to examine the implications of national language policy on junior high school students' ability to write formal letters in a digital communication context. The research employs a qualitative approach with a case study design conducted at a public junior high school in Cirebon Regency. The findings reveal that the implementation of national language policy has not been optimal in fostering students' competence in using formal language in digital environments. The dominance of informal digital communication practices contributes to students' low proficiency in composing formal letters in accordance with linguistic conventions. These findings indicate a gap between language policy directives and the actual practices of Indonesian language instruction in schools. The main contribution of this study lies in highlighting the need to reorient language learning to be adaptive to digital contexts without neglecting formal language standards. Therefore, this study recommends strengthening the implementation of national language policy through the integration of contextual and multimodal approaches in the Indonesian language curriculum and classroom practices to enhance students' formal literacy skills.



## Pendahuluan

Bahasa memiliki peran strategis dalam membentuk identitas nasional dan mendukung komunikasi formal dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, kebijakan bahasa nasional telah menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang harus digunakan secara baik dan benar dalam kehidupan formal maupun informal (Kemendikbud, 2020). Di Indonesia, kebijakan bahasa nasional menegaskan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang wajib digunakan secara baik dan benar, khususnya dalam ranah pendidikan dan administrasi formal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009).

Bahasa memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan identitas nasional, pembangunan sosial, dan komunikasi antarwarga negara. Dalam konteks kebangsaan, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol integrasi dan kohesi sosial (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63, n.d.). Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini diimplementasikan melalui pembelajaran Bahasa Indonesia, salah satunya pada keterampilan menulis surat resmi yang menuntut ketepatan struktur, penggunaan bahasa baku, serta kesesuaian dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) (Pusat Bahasa, 2017).

Namun, perkembangan era digital telah memengaruhi pola komunikasi siswa secara signifikan. Siswa lebih terbiasa menggunakan bahasa informal dalam media sosial dan aplikasi pesan instan, seperti penggunaan singkatan, kalimat tidak baku, dan gaya komunikasi nonformal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks formal, termasuk surat resmi, baik dari aspek struktur, pilihan diksi, maupun ketepatan ejaan (Nuryanti et al., 2021). Selain itu, guru juga perlu memberikan umpan balik langsung terhadap kesalahan ejaan dan tanda baca dalam hasil tulisan siswa agar pembelajaran bersifat korektif dan reflektif. Pemberian umpan balik yang bersifat formatif dan konsisten terbukti meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kaidah kebahasaan dalam komunikasi tulis formal (Mulyati, 2013). Selain itu, pembelajaran menulis di sekolah masih cenderung berorientasi pada aspek teoretis dan kurang kontekstual, sehingga belum mampu menjembatani kebutuhan komunikasi formal di era digital (Hasanuddin, 2015).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis surat resmi siswa masih rendah akibat lemahnya penguasaan struktur, kaidah kebahasaan, dan kurangnya pendekatan pembelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan siswa (Ahmad & Sari, 2022; Rohmadi, 2013). Di sisi lain, kebijakan bahasa nasional yang seharusnya menjadi landasan dalam penggunaan bahasa formal di lingkungan pendidikan belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam praktik pembelajaran (Mahsun, 2021; Moeliono, 2017).

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pembelajaran menulis surat resmi termasuk ke dalam kompetensi dasar yang menuntut siswa mampu menyusun teks sesuai dengan konteks penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek teoretis, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk menulis secara fungsional dan bermakna. Pendekatan kontekstual, misalnya, diyakini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam menulis surat resmi karena pembelajaran disesuaikan dengan pengalaman dan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa (Sanjaya, 2011).

Struktur surat resmi merupakan unsur fundamental dalam keterampilan menulis surat yang berfungsi untuk membedakan antara surat resmi dengan bentuk surat lainnya. Surat resmi memiliki unsur-unsur tetap seperti kepala surat, tanggal, nomor surat, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim, serta tembusan jika diperlukan (Keraf, 2004). Struktur ini penting diajarkan secara eksplisit dalam pembelajaran karena setiap bagian memiliki fungsi komunikatif yang berbeda, yang mencerminkan formalitas dan kejelasan dalam menyampaikan informasi.

Dalam konteks pembelajaran di tingkat SMP, pemahaman struktur surat resmi menjadi dasar bagi siswa untuk menulis secara sistematis dan sesuai dengan konvensi kebahasaan yang berlaku. Siswa yang diajarkan struktur surat secara rinci lebih mampu mengorganisasikan gagasannya dengan tepat dibandingkan dengan siswa yang hanya mendapatkan pendekatan pembelajaran tekstual tanpa penekanan pada struktur (Widyastuti, 2019). Oleh karena itu, pengenalan dan latihan menyusun struktur surat resmi merupakan aspek penting dalam pengembangan keterampilan menulis siswa.

Kemampuan menulis merupakan salah satu keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Di antara berbagai jenis keterampilan menulis, menulis surat resmi merupakan bentuk komunikasi tertulis yang tidak hanya menuntut penguasaan struktur bahasa yang baik dan benar, tetapi juga pemahaman terhadap konvensi kebahasaan, format, dan tujuan komunikatif yang spesifik (Tarigan, 2008). Surat resmi digunakan dalam situasi formal dan mengandung maksud tertentu, seperti pemberitahuan, permohonan, atau undangan, yang memerlukan ketepatan bentuk dan kejelasan isi.

Kebijakan bahasa nasional Indonesia bertujuan untuk memperkuat fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, serta bahasa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Alwasilah, 2013). Namun demikian, kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan yang kompleks, seperti ketimpangan antara penggunaan Bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah, dominasi bahasa asing dalam ruang publik dan akademik, serta lemahnya implementasi kebijakan dalam ranah pendidikan dan media massa (Musgrave, 2014). Dalam implementasinya, kebijakan bahasa nasional sering kali menghadapi tarik-menarik kepentingan antara nasionalisme bahasa dan globalisasi linguistik. Hal ini tampak dari semakin meluasnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam dunia pendidikan tinggi, periklanan, dan industri digital yang menggeser posisi strategis Bahasa Indonesia (Sugihastuti, 2020).

Meskipun berbagai studi telah membahas pembelajaran menulis dan kebijakan bahasa secara terpisah, kajian yang secara khusus mengaitkan implementasi kebijakan bahasa nasional dengan kemampuan menulis surat resmi siswa dalam konteks komunikasi digital masih terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami bagaimana kebijakan bahasa nasional diimplementasikan dalam pembelajaran menulis surat resmi serta bagaimana implikasinya terhadap kemampuan siswa di tengah dominasi komunikasi digital informal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan bahasa nasional terhadap pembelajaran menulis surat resmi pada siswa SMP dalam konteks digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi

pembelajaran yang lebih kontekstual dan adaptif, serta memperkuat implementasi kebijakan bahasa nasional dalam meningkatkan literasi formal siswa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan bahasa nasional dalam pembelajaran menulis surat resmi di konteks nyata sekolah (Creswell, 2016; Yin, 2014). Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, yang dipilih secara purposif karena telah menerapkan pembelajaran berbasis digital dan memuat materi penulisan surat resmi dalam kurikulum Bahasa Indonesia.

Subjek penelitian terdiri atas satu guru Bahasa Indonesia kelas VII, satu kepala sekolah, dan delapan siswa kelas VII yang telah mempelajari materi surat resmi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pembelajaran dan implementasi kebijakan bahasa (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih empat minggu melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif dilakukan sebanyak empat kali pertemuan pembelajaran (masing-masing 2 x 40 menit) untuk mengamati strategi pengajaran, penggunaan bahasa oleh guru dan siswa, serta integrasi kaidah bahasa baku dalam pembelajaran. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap seluruh informan dengan durasi 20–40 menit per informan, yang berfokus pada pemahaman mereka terhadap kebijakan bahasa nasional, praktik penggunaan bahasa resmi, serta kendala dalam pembelajaran di era digital. Ketiga, studi dokumentasi meliputi analisis silabus, modul ajar, serta delapan contoh surat resmi hasil tulisan siswa untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan struktur, ejaan, dan penggunaan bahasa baku (Pusat Bahasa, 2017).

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik yang meliputi proses pengodean terbuka, kategorisasi, dan penarikan tema (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara dan observasi ditranskripsi, kemudian diberi kode awal seperti “penggunaan bahasa informal”, “kesalahan struktur surat”, dan “strategi pembelajaran”. Kode-kode tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi kategori yang lebih besar untuk menemukan pola dan hubungan antartema. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan meminta informan memverifikasi hasil ringkasan wawancara, serta *peer debriefing* dengan sesama peneliti untuk menguji konsistensi interpretasi data (Creswell, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bahasa nasional dalam pembelajaran menulis surat resmi di SMP Negeri 1 Sumber belum berjalan secara sistemik, melainkan masih bersifat parsial dan administratif. Meskipun sekolah telah memiliki infrastruktur digital yang memadai dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi, hal tersebut belum diikuti oleh penguatan penggunaan bahasa baku dalam praktik pembelajaran. Dengan kata lain, terdapat ketidaksinkronan antara modernisasi media pembelajaran dan substansi kebijakan kebahasaan yang seharusnya menyertainya.

Secara struktural, kebijakan bahasa nasional belum terinternalisasi dalam tiga level utama, yaitu kurikulum, praktik pedagogis, dan budaya literasi sekolah. Pada level kurikulum, materi penulisan surat resmi memang telah tercantum dalam Capaian Pembelajaran, namun tidak diikuti dengan indikator operasional yang secara eksplisit menekankan penggunaan bahasa baku dan kaidah ejaan (Pusat Bahasa, 2017). Pada level praktik pedagogis, hasil observasi menunjukkan bahwa guru lebih menekankan aspek format dan penyelesaian tugas dibandingkan dengan pembentukan kesadaran berbahasa formal. Hal ini mencerminkan adanya reduksi makna kebijakan bahasa menjadi sekadar pemenuhan target kurikulum, bukan sebagai upaya pembentukan kompetensi kebahasaan secara utuh.

Pada level budaya literasi, dominasi bahasa informal dalam interaksi siswa, baik secara lisan maupun tertulis, menunjukkan bahwa lingkungan sekolah belum mampu menjadi ruang praktik penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma formal. Penggunaan bahasa campuran dan gaya komunikasi digital dalam diskusi kelas mengindikasikan bahwa kebijakan bahasa nasional belum berfungsi sebagai regulasi kultural yang membentuk kebiasaan berbahasa siswa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan siswa yang cenderung menyederhanakan struktur dan bahasa surat resmi, serta rendahnya pemahaman mereka terhadap perbedaan antara ragam bahasa formal dan informal.

Dari sisi kebijakan, temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bahasa nasional masih berhenti pada tataran normatif dan belum diterjemahkan ke dalam program sekolah yang konkret, seperti pelatihan guru, penguatan literasi formal, atau integrasi kebijakan bahasa dalam sistem evaluasi pembelajaran. Tidak adanya monitoring dan evaluasi khusus terkait penggunaan bahasa baku dalam pembelajaran memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut belum menjadi prioritas institusional.

Analisis terhadap 24 dokumen surat resmi siswa memperkuat temuan ini. Kesalahan yang dominan meliputi ketidaktepatan struktur surat (misalnya, tidak mencantumkan nomor surat atau tembusan), penggunaan bahasa tidak baku (seperti “dateng”, “ngundang”), serta kesalahan ejaan dan tanda baca. Pola kesalahan ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mengalami kesulitan teknis, tetapi juga belum memiliki kerangka konseptual tentang fungsi dan norma bahasa formal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural antara kebijakan bahasa nasional dan praktik pembelajaran di kelas. Kebijakan belum terintegrasi secara vertikal (dari regulasi ke praktik) maupun horizontal (antar komponen sekolah), sehingga tidak mampu secara efektif membentuk kompetensi literasi formal siswa di tengah tekanan budaya komunikasi digital yang informal.

**Tabel 1.** Hasil Analisis Surat

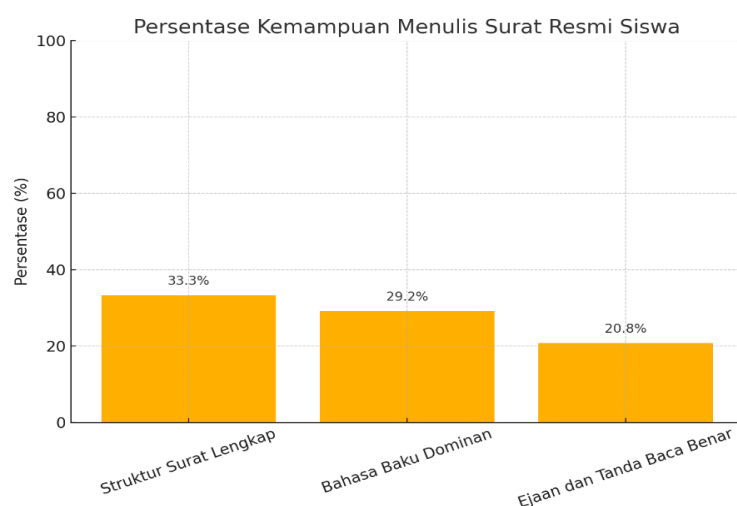
Aspek yang Dianalisis	Temuan
Struktur surat	Hanya 8 dari 24 siswa yang mencantumkan semua bagian surat resmi (kop surat, nomor, hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim). Sebagian besar siswa lupa menuliskan hal dan tembusan.
Bahasa baku	17 dari 24 surat menggunakan campuran bahasa baku dan tidak baku. Misalnya, frasa seperti “kami pengen ngadain acara” dan “buat undangan kalian” muncul pada paragraf isi.
Ejaan dan tanda baca	Sebanyak 19 dari 24 tulisan mengandung kesalahan kapitalisasi (huruf awal pada nama atau tempat), penggunaan koma yang tidak tepat, dan tidak adanya titik pada akhir kalimat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan bahasa nasional, sebagaimana tertuang dalam PUEBI (2020) dan peraturan Badan Bahasa, belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMP. Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis surat resmi dapat ditelusuri ke tiga faktor utama:

Kurikulum yang minim integrasi eksplisit terhadap kebijakan bahasa nasional dalam konteks digital. Seperti disampaikan oleh guru, pembelajaran masih bersifat prosedural (mengisi format surat), bukan substantif (membangun kesadaran berbahasa resmi). Pengaruh komunikasi digital informal yang sangat kuat di kalangan siswa. Gaya bahasa sehari-hari siswa lebih banyak dipengaruhi oleh pesan instan dan media sosial yang cenderung tidak mematuhi kaidah bahasa baku. Kurangnya pelatihan dan penguatan dari pihak sekolah terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi tertulis, baik melalui literasi digital maupun proyek berbasis teks resmi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian, bahwa siswa seringkali mencampuradukkan ragam bahasa karena lemahnya pembiasaan terhadap konteks komunikasi formal (Suyanto & Indriani, 2021). Selain itu pembelajaran menulis surat resmi belum didukung oleh evaluasi kebahasaan yang ketat, sehingga siswa cenderung abai terhadap struktur dan ejaan (Nurhayati, 2020). Implikasinya, perlu ada reorientasi pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis kontekstual dan multimodal, yang mengintegrasikan kebijakan bahasa nasional dalam konteks kekinian, termasuk dunia digital dan komunikasi sosial media. Guru tidak hanya dituntut mengajarkan format surat, tetapi juga membangun kesadaran linguistik siswa terhadap pentingnya bahasa baku sebagai alat komunikasi resmi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa SMP dalam menulis surat resmi mengalami penurunan yang signifikan, baik dari segi struktur, kebahasaan, maupun penggunaan ejaan yang sesuai. Analisis terhadap hasil tulisan siswa menunjukkan bahwa:



**Gambar 1.** Grafik Persentase Kemampuan Menulis Surat Resmi Siswa

1. Kesalahan Struktur Surat: Sebagian besar siswa tidak memahami susunan surat resmi seperti kepala surat, salam pembuka, isi, penutup, dan tanda tangan. Banyak surat yang ditulis tanpa format baku.
2. Penggunaan Bahasa Tidak Baku: Kalimat yang digunakan cenderung bersifat percakapan, banyak menggunakan singkatan, dan tidak mencerminkan ragam bahasa resmi.

3. Kesalahan Ejaan dan Tanda Baca: Terdapat banyak kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata sesuai dengan PUEBI. Ditegaskan pada tanda baca.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara tujuan kebijakan bahasa nasional dan realitas pembelajaran di sekolah. Kebijakan tersebut belum secara operasional diterjemahkan ke dalam strategi pembelajaran yang relevan dengan konteks digital saat ini.

Temuan ini mendukung bahwa kebijakan bahasa di Indonesia masih bersifat *topdown* dan belum responsif terhadap dinamika generasi digital (Mahsun, 2021). Implikasi ini menuntut adanya desain pembelajaran menulis yang lebih kontekstual, multimodal, dan berbasis tugas autentik, agar siswa tidak hanya memahami bentuk surat resmi secara teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara praktis.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan menulis surat resmi pada siswa SMP tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga oleh belum optimalnya implementasi kebijakan bahasa nasional dalam praktik pembelajaran. Kebijakan tersebut cenderung masih bersifat normatif dan belum terintegrasi secara konkret dalam strategi pengajaran di kelas, terutama dalam menghadapi realitas komunikasi digital yang didominasi oleh penggunaan bahasa informal. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan kaidah bahasa baku, struktur surat resmi, serta ketepatan ejaan dalam konteks penulisan formal. Secara kritis, temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran. Guru belum sepenuhnya memanfaatkan pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kebiasaan literasi digital siswa, sehingga pembelajaran menulis surat resmi kurang bermakna dan tidak adaptif terhadap perkembangan komunikasi saat ini.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada satu lokasi sekolah dengan jumlah informan yang relatif kecil, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, durasi penelitian yang singkat belum memungkinkan pengamatan terhadap perubahan kemampuan siswa dalam jangka panjang atau evaluasi terhadap efektivitas intervensi pembelajaran tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret, yaitu: (1) pengembangan model pembelajaran menulis surat resmi berbasis proyek yang memanfaatkan media digital, seperti simulasi penulisan surat dinas melalui email atau platform pembelajaran; (2) integrasi eksplisit indikator kebijakan bahasa nasional ke dalam perangkat ajar dan penilaian; serta (3) peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran kontekstual yang menggabungkan literasi digital dan penggunaan bahasa baku. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas model pembelajaran tersebut melalui desain eksperimen atau mixed methods dengan cakupan sampel yang lebih luas.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, R., & Sari, N. (2022). Analisis kesalahan penulisan surat resmi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Surakarta. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 10(1), 45–54.  
<https://doi.org/10.21274/jpbsi.2023.3.1.1-10>
- Alwasilah, A. C. (2013). *Filsafat bahasa dan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin, H. (2015). *Pembelajaran menulis dalam Bahasa Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kemendikbud. (2020). *Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (Edisi V)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kemendikbudristek. (2020). *Kurikulum merdeka: Panduan pembelajaran Bahasa Indonesia SMP*. Direktorat Jenderal GTK.
- Keraf, G. (2004). *Komposisi*. Gramedia.
- Mahsun. (2021). Kebijakan bahasa di Indonesia: Problematika dan solusinya dalam perspektif sosiolinguistik. *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 7(2), 145–158.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Moeliono, A. M. (2017). *Cakrawala bahasa Indonesia*. Gramedia.
- Mulyati, Y. (2013). Pemberian umpan balik dalam pembelajaran menulis bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 13(2), 145–156.
- Musgrave, S. (2014). Language policy and language ideology in Indonesia: Issues of implementation. *Language Policy*, 13(4), 315–330.
- Nurhayati, S. (2020). Kesalahan ejaan dan tanda baca dalam teks surat resmi siswa SMP. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 10(1), 33–42.
- Nuryanti, T., Lestari, H., & Ramadhani, F. (2021). Pengaruh media sosial terhadap penurunan kemampuan menulis formal siswa. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 6(2), 120–131.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63. (n.d.). *Penggunaan bahasa Indonesia* (p. 2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- Pusat Bahasa. (2017). *Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia*. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Rohmadi, M. (2013). *Strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA*. Yuma Pustaka.
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana.
- Sugihastuti. (2020). Bahasa Indonesia dalam era globalisasi: Antara identitas nasional dan tuntutan internasional. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, R., & Indriani, L. (2021). Pemanfaatan model kontekstual dalam pembelajaran menulis surat resmi di SMP. *Lingua Educatia*, 18(1), 25–35.
- Tarigan. (2008). *Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa*. Angkasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24. (2009). *Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan*. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Widyastuti, A. (2019). Pengaruh pemahaman struktur surat terhadap keterampilan menulis surat resmi siswa SMP. *Jurnal Edukasi Bahasa dan Sastra*, 17(2), 111–122.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.